

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA  
ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM KORBAN TRAFFICKING DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**ARGO KRISINARANTO**  
**NPM. 0671010040**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2010**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpah rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul " IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TRAFIKING DI SURABAYA."

Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum serta selaku dosen pembimbing utama yang telah menyempatkan waktu dan memberi ilmu dalam setiap bimbingan.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadep II Fakultas Hukum.
3. Bapak Subani SH, MSi, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.

4. Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberi waktu dalam meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Alm. Yuliandari selaku ibunda dari penulis yang telah memberi arti cinta dan kasih sayang bagi penulis sampai akhir hayatnya.
7. Bapak dan keluarga besar Yoyok. Koeshartoyo yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk calon pendamping hidupku Herlyna Dwi Yusnita yang telah membantu, memberi semangat dan meluangkan waktu bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Shafareza E.A, Hary Abrianto, Ricky Herdian, Ari Handoko, Ardi Nugrahanto, Sigit Priambodo, Dhimas "apotek" serta ibu kantin dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangatlah dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,     Oktober 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	6
1.5.2 Pengertian Umum Tentang Trafiking .....	9
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.6.1 Pendekatan Masalah .....	10
1.6.2 Sumber Bahan Hukum .....	11

1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	12
1.6.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya</b>	
<b>Masalah Perdagangan Anak .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	18
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	19
2.2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	21
2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	23
2.2 Perkembangan Kasus Perdagangan Anak .....	24
2.3 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	27
2.3.1 Skema Tentang Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak .	30
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya	
Masalah Perdagangan Anak .....	32
<b>BAB III Upaya Perlindungan Hukum Dalam Meminimalisasi Masalah</b>	
<b>Trafficking Anak.....</b>	<b>36</b>
3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak .....	36
3.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	37
3.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	38
3.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Hukum Tentang Anak .....	40
3.1.4 Sifat-sifat Perlindungan Hukum .....	41
3.2 Upaya Perlindungan Hukum secara Preventif (Pencegahan) .....	42

3.2.1	Pengertian Upaya Preventif .....	42
3.2.2	Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Preventif .....	45
3.3	Upaya Perlindungan Hukum secara Represif .....	48
3.3.1	Pengertian Upaya Represif .....	48
3.3.2	Bentuk-Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Represif Dalam Undang-Undang .....	49
3.3.3	Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran .....	56

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Tentang Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak ..... 30

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Argo Krisinaranto  
NPM : 0671010040  
Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 11 Desember 1987  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG KHUSUSNYA ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TRAFFICKING DI SURABAYA**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap aturan-aturan hukum yang menyangkut perdagangan anak serta bagaimana proses perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menelaah lebih lanjut tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perkara tindak pidana perdagangan anak. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang (trafiking) merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan dan anak untuk dijadikan korban jika masalah tersebut tidak segera ditanggulangi oleh aparat hukum, pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara kita karena anak pada hakekatnya adalah penerus cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak ini sangatlah penting agar untuk kedepannya hal tersebut dapat diminimalisasi dan sebisa mungkin dapat dicegah.

Kata kunci : Trafficking, Perdagangan Anak, Perlindungan Hukum.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus perdagangan anak atau perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak. Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak. Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Namun tidak hanya itu, menurut Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan mengatakan, selain dari aspek ekonomi, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan anak. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang.<sup>1</sup>

Banyak ahli mengatakan, perdagangan anak merupakan masalah yang gampang–gampang susah. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprehensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui oleh Drs. Ulaen yang mengatakan bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan pengertian aparat negara yang terkait dengan tindak pidana ini diberi sanksi yang tegas agar timbul rasa jera.<sup>2</sup> Dan untuk mengentaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Karena kasus perdagangan perempuan dan anak biasanya baru terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Hesti Armiwulan, <http://www.surya.co.id/2009/08/03/tuntaskan-Trafficking.html> Senin, Tgl 25 Oktober 2010, pk1 21.30

<sup>2</sup> Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010. halaman 169

Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani.

Hal-hal yang diuraikan diatas dialami juga oleh Vita yang berumur 17 tahun dan Elen yang masih berumur 15 tahun. Mereka menjadi korban perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa Afif dan Vey dengan modus Afif menawarkan perempuan yang dapat "*dibooking*" melalui foto yang dipasang di *facebook*, lalu "tamu" atau "pemesan" dapat menghubungi HP Afif jika berminat. Setelah "tamu" atau "pemesan" berminat, maka Afif memberikan ciri-ciri dan harga perempuan tersebut kepada "pemesan". Setelah terjadi kesepakatan harga, Afif akan menentukan tempat pertemuan dengan "pemesan" di suatu hotel yang telah dibooking untuk mengambil pembayaran. Kemudian Afif menghubungi terdakwa Vey untuk mengantarkan korban kepada lelaki hidung belang tersebut ke hotel yang telah dipesan sebelumnya.

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa Afif dan Vey dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 2 jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan UU T.P Perdagangan Orang) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu peranan penting pemerintah dalam menghentikan masalah perdagangan anak adalah mengatasi masalah-masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan. Dan satu kata kunci yang penting adalah “pemberdayaan”. Hal ini sangat penting bagi para individu yang menjadi korban perdagangan anak. Banyak para korban perdagangan anak yang mengalami kebingungan akan berbuat apa dan akan berkerja apa setelah dipulangkan. Maka disini peranan pemerintah sangatlah penting dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para korban perdagangan anak agar mereka tidak terjat lagi dalam permasalahan yang sama. Perdagangan anak bukanlah suatu fenomena baru lagi di Indonesia, dan meskipun perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban perdagangan orang lebih identik dengan perdagangan perempuan dan anak, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan perempuan dan anak lebih menojol ke permukaan. UNICEF (2009)<sup>3</sup>, misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul ” IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TRAFFICKING DI SURABAYA.”

---

<sup>3</sup> <http://khppia-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3>. Selasa, tgl 12 oktober 2010, pkl 16.51

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan disusun angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban *Trafficking* (khususnya pada anak)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban *Trafficking* (khususnya pada anak) di Surabaya.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis :**

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perdagangan.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>4</sup>

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

---

<sup>4</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007 hal 32.

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Selain itu, pengertian anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.<sup>5</sup> Para ahli yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, juga mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, dan anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.<sup>6</sup>

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa :

”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>5</sup> John Locke, <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>. Kamis, Tgl 23 September 2010, pkl 16.00

<sup>6</sup> Augustinus, *Pengertian Anak*, Suryabrata, Jakarta, 1987, hal.14.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :

”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak), dan Pasal 1 angka (5) UU T.P Perdagangan Orang yaitu:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak), pengertian anak adalah:

”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya



putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Menurut UU Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

### **1.5.2 Pengertian Umum tentang Trafficking**

*Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.

Pengertian *Trafficking* yang pada umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *Trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *Trafficking* adalah

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Masalah :**

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>7</sup>

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perdagangan anak, yang diatur sesuai dengan UU T.P Perdagangan Orang tentang Perdagangan Anak dan Perempuan sebagai korban dan penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan KUHP.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 87

### 1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi,

internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian yang diperoleh dengan membaca literatur yang ada kaitannya dengan tema skripsi "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TRAFFICKING DI SURABAYA".

Penelitian ilmu hukum Normatif dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 166

## 1.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ” IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA ANAK DAN RELEVANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TRAFFICKING DI SURABAYA.”

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini maka sistematika penulisan terdiri dari 4 Bab yaitu :

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum serta metode pengumpulan data dan selanjutnya sistematika penulisan.

Pada Bab II menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak. Dalam bab II ini terdiri 4 sub bab yaitu Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, Perkembangan Kasus Perdagangan Anak, Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Masalah Perdagangan Anak. Dalam sub bab pertama terdiri atas 4 (empat) sub-sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak, Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak. Serta sub bab tiga terdiri

atas 1 (satu) sub-sub bab yaitu Skema Tentang Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Pada Bab III menguraikan tentang upaya hukum preventif dan represif untuk meminimalisasi masalah perdagangan anak di Surabaya. Dalam bab III ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Tinjauan umum Perlindungan Hukum Anak, Upaya perlindungan Hukum secara preventif, Upaya perlindungan hukum secara represif. Dalam sub bab pertama terdiri atas 4 (empat) sub-sub bab yaitu Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dasar Hukum Perlindungan Hukum Tentang Anak dan Sifat-sifat Perlindungan Hukum. Sub bab kedua terdiri atas 2 (dua) sub-sub bab yaitu Pengertian Upaya Preventif dan Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Preventif. Serta sub bab ketiga terdiri atas 3 (tiga) sub-sub bab yaitu Pengertian Upaya Represif, Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Represif dalam Undang-Undang dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Pada Bab IV menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini menyimpulkan berbagai permasalahan yang telah dibahas dan kemudian diuraikan secara jelas lalu diberi saran yang bermanfaat tentang permasalahan yang telah dibahas, yang merupakan hasil dari tulisan serta berisi tentang rekomendasi yang telah dipaparkan dalam bentuk saran.